LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2020

PEMERINTAHAN KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Kecamatan Pucuk ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2018 - 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pucuk, April 2021

CAMAT PUCUK

DEDDY DIAN ALI, SE, MM

Pembina Tingkat I

197008142003121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum.....…… 1

A. Dasar Hukum …… 1

B. Data Geografis …….. 1

C. Gambaran Umum Daerah ……... 2

D. Jumlah Desa/Kelurahan …….. 3

E. Jumlah Perangkat Daerah Unir Pemerintah Daerah ….. 3

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ……. 4

1.1.2 Perencanaan dan Pembangunan Daerah …… 5

A. Permasalahan dan Strategi Daerah …….. 5

B Visi dan Misi 7

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah …….. 9

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan …….. 9

1.1.3 Penerapan Standart Pelayanan Minimal …….. 10

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ……. 11

2.1 Capaian Kinerja Makro …….. 11

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah …….. 11

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran ……..… 11

B. Indikator Kinerja Kunci Hasil Keluaran …… 11

C. Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah… 11

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ……... 12

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ……..…… 12

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Target Perjanjian Kinerja …… 12

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya …….. 13

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah …… 14
E. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (kinerja) Yang Telah Dicapai ……. 16
F. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja …… 17
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU …… 18
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL …… 19
4.1 Program dan Kegiatan …….. 19
1. Program dan Kegiatan …… 19
2. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanaan Minimal …… 20
BAB V PENUTUP …….. 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan LPPD tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan PP No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tentang Pemerintahan Daerah serta pp no.03/2007 LPPD yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 8 PP NO.3 Tahun 2007 , LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (Satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang di sampaikan oleh oleh kepala daerah kepada kepala pemerintahan.

B. DATA GEOGRAFIS

Kecamatan Pucuk terletak disebelah timur laut Ibu Kota Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk mempunyai luas wilayah 42,92 Km2 atau 4.292,47 Ha dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pucuk
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukodadi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sugio
- Sebelah Barat : Kecamatan Babat

Adapun pembagian penggunaan tanah di Kecamatan Pucuk dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tanah sawah/ tambak : 3.805,75 ha.
- Tanah Pekarangan : 397,45 ha.
- Tanah lainnya : 89,27 ha.

Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan se Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah	
			Desa/Kel	Dusun
1	Pucuk	70,15	17	34
Jumlah		70,15	17	34

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan Pucuk	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pucuk	24.429	23.342	47.771	14.906
Jumlah		24.429	23.342		

Selanjutnya untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Struktur Penduduk Menurut

Usia Dan Jenis Kelamin Kabupaten Lamongan Tahun 2020

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
60-64	1.578	1.458	3.036
55-59	1.255	1.200	2.455
50-54	1.505	1.447	2.952
45-49	1.704	1.664	3.368
40-44	2.015	1.902	3.917
35-39	2.117	1.993	4.110
30-34	2.131	1.999	4.130
25-29	2.112	1.986	4.098
20-24	2.180	2.058	4.238
15-19	2.129	2.051	4.180
10-14	2.024	1.903	3.927
5-9	1.670	1.680	3.350
0-4	1.995	2.001	3.996
Jumlah	24.415	23.342	47.757

- Angka Sementara

  Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	2	3	4
A	Bekerja		
1	Petani/Pekebun	9.706	
2	Wiraswasta	10.219	
3	Swasta	5.055	
4	Pegawai Swasta		
5	Pedagang	4.584	
6	Nelayan		
7	Buruh		
8	PNS		
9	Guru/Dosen		
10	Lain-Lain	587	
11	Tenaga Medis		
12	TNI		
15	POLRI		
14	Pembantu		
15	Industri	2	
16	Dokter		
17	Pemerintahan	476	
18	Pelajar Mahasiswa	7.339	
19	Tidak bekerja	9.785	
	Jumlah	47.753	

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah *)	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah, Tidak/Belum Tamat SD/MI	10.733	
2	SD/ MI	15.314	
3	SLTP (SMP/ MTs)	10.606	
4	SLTA (SMU/ SMK/ MA)	8.569	
5	D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/ PT)	1.002	
6	S-1	1.425	
7	S-2	106	
8	S-3	1	
Jumlah		47.756	

D. JUMLAH DESA/KELURAHAN

Data jumlah Desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sejumlah 17 Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Babatkumpul
2. 11. Plosoetro
3. Bugoharjo
4. Cungkup
5. Gempolpading
6. Karangtinggil
7. Kedali
8. Kesambi
9. Ngambeg
10. Padenganploo
11. Paji
12. Pucuk
13. Sumberjo
14. Tanggungan
15. Wanar
16. Warukulon
17. Waruwetan

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH UNIT PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Jumlah perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah di wilayah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
1.	DEDDY DIAN ALI, SE, MM	Pembina Tk. I	Camat	S 2
2.	Drs. WAHYU AGUS H, MM	Pembina	Sekcam	S 2
3.	MUZAYIN, S.Sos., M.M.	Pembina	Kasi PEM	S 1
4.	NURSIH HIDAYATI, SE, MM	Penata	Kasi PMD	S 2
5.	MASDAR, S.Sos	Penata Tk.I	Kasi Trantib	S 1

6.	SUYITNO, S.Sos	Penata Tk. I	Kasubag Umum	S 1
7.	KOSYIM, SE	Penata Tk. I	Kasubag Keuangan	S 1
8.	ABDUL AZIZ ZUHRI, SH	Penata Tk. I	Staf	S 1
9.	RAHMAWATI, SH	Penata Muda Tk.I	Staf	S 1
10.	RUMINI	Penata Muda Tk.I	Staf	S 1
11.	SUHARTONO, SE	Penata Muda Tk.I	Staf	S 1
12.	MOH. IKSAN	Pengatur Tk.I	Staf	MA
13.	SUSANTO	Pengatur Tk.I	Staf	STM
14.	SUMANTRI	Pengatur Tk.I	Staf	S 1
15.	ANIS AGUS SETYANINGRUM	Pengatur Tk.I	Staf	SMA
16.	BASHORI	Pengatur	Staf	SMA
17.	MOH. KHOIRUL HUDA	Penata Muda	Staf	S 1
18.	BAMBANG SUMITRO	Pengatur	Staf	SMA
19.	KACUNG SUPRIYANTO	Pengatur	Staf	SMA
20.	SUTRIMO	Pengatur Md. Tk.I	Staf	SMA
21	MUSLIMIN	Pengatur Muda	Staf	SMA

F. REALISASI ANGGARAN PNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Belanja asli daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.156.556.500,00 telah terealisasi sebesar Rp 2.900.542.588,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 256.013.912,00 atau terealisasi 91,89 %. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.266.639.500,00 realisasi sebesar Rp. 2.100.546.659,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 166.092.841,000 atau terealisasi 92,67 %.dan Belanja langsung sebesar Rp. 889.917.000,00 realisasi sebesar Rp. 799.995.929,00 sehingga tersapat sisa dana sebesar Rp. 89.921.071,00 atau terealisasi 89,90 %. adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	
			(Rp.)	%
BELANJA DAERAH	**3.260.508.800,00**	**3.144.946.249,00**	**115.562.551,00**	**96,46**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.947.930.000,00**	**1.876.158.977,00**	**71.771.023,00**	**96,32**
BELANJA LANGSUNG	**1.312.578.800,00**	**1.268.787.272,00**	**43.791.528,00**	**96,66**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**212.956.800,00**	**185.001.672,00**	**27.955.128,00**	**86,87**
Penyediaan Jasa Perkantoran	130.458.800,00	102.504.372,00	27.954.428,00	78,57
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	82.498.000,00	82.497.300,00	700,00	100

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	**893.275.000,00**	**883.103.600,00**	**10.171.400,00**	**98,86**
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	83.275.000,00	82.130.000,00	1.145.000,00	98,63
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100
Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	725.000.000,00	716.079.000,00	8.921.000,00	98,77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000,00	29.894.600,00	105.400,00	99,65
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**-**	**100**
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**	**100**
Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	**37.000.000,00**	**36.450.000,00**	**550.000,00**	**98,51**
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	37.000.000,00	36.450.000,00	550.000,00	98,51
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	**120.547.000,00**	**115.432.000,00**	**5.115.000,00**	**95,76**
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	10.000.000,00	9.970.000,00	30.000,00	99,70
Pengendalian Keamanan Lingkungan	25.047.000,00	25.037.000,00	10.000,00	99,96
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	50.000.000,00	44.935.000,00	5.065.000,00	89,87
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN DAN STRATEGIS DAERAH

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati untuk menangani sebagaian urusan Otonomi Daerah sesuai dengan pasal 126 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dipertegas dalam pasal 5 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah tahun 1999 hal ini mengandung pengertian bahwa Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas ditinjau dari tugas dan fungsi Kecamatan, terdapat penegasan bahwa tugas pelayanan ini menjadi prioritas dengan penekanan upaya mendahulukan kepentingan umum dan memberikan kepuasan kepada publik dalam kondisi Edial terdapat 4

fungsi pokok Kecamatan yakni fungsi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dengan kompleksitas fungsi yang tentunya harus didukung oleh beberapa hal antara lain :

- Kewenangan
- Pendanaan
- Insfrastruktur dan
- Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam prespektif PD Kecamatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, pembentukan Kecamatan sebagai PD tersendiri membawa Kosekuwensi bahwa Kecamatan setara dengan Dinas atau Kantor yang diberikan urusan khusus, kondisi yang diharapkan dengan dibentuknya Satuan Perangkatkerja Daerah (PD) Kecamatan :

a. Terealisasinya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang muda, murah cepat dan berkwalitas.
b. Mempercepat pengambilan Keputusan berkaitan dengan kepentingan dan Kebutuhan masyarakat setempat, sebagai upaya mempercepat implementasi program-program pemberdayaan masyarakat.
c. Mendekatkan pelayanan Pemerintah Kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih berkwalitas.
d. Mempersempit rentang kendali dari Bupati Kepada Desa
e. Terjadi pembinaan efektif, hasil yang diharapkan yaitu terjadinya kaderisasi kepemimpinan Pemerintahan.

Disamping permasalahan diatas tersebut, permasalahan yang paling menonjol dan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah (PD) Kecamatan pada tahun 2019 atau diawal-awal menjadi PD yaitu :

1. Personil atau staf Kabupaten yang menangani Keuangan dalam memberikan keterangan /penjelasan kurang optimal
2. Kepastian dalam penjelasan penggunaan uang persediaan (UP) hanya menyebutkan bahwa bisa dibelanjakan sesuai dengan yang dibutuhkan, akan tetapi hal tersebut bila difahami oleh Bendahara Kecamatan UP tersebut dibelanjakan kebutuhan pada bulan Januari
3. Bendahara Kecamatan yang membuat SPJ terkadang mengalami permasalahan ketika diakhir tahun bahwa apa yang telah dibelanjakan dengan UP tersebut ternyata ada pemahaman yang beda dengan personil Kabupaten

4. Dalam bidang akuntansi juga, Bendahara dalam berkoordinasi dengan personil Kabupaten dalam memberikan penjelasan kurang optimasi (yang dimaksud sepotong-potong dalam memberikan penjelasan satu permasalahan yang ditanyakan tidak sekaligus).

2. STRATEGI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kecamatan Pucuk ada beberapa unsur dan fungsi yang telah ditetapkan, peran Kecamatan mendapatkan perhatian yang relatif lebih sehingga segala kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dihasilkannya senantiasa mendapatkan respon capaian yang sifatnya positif. Berkaitan dengan hal tersebut dan guna memperjelas arah dan langkah Kecamatan Pucuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai penekanan yang ada dalam Renstra Kabupaten Lamongan dengan langkah-langkah sebagai kunci dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan masyarakat;
- Meningkatkan pertumbuhan pemerintahan yang positif dan profesional;
- Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan yang berkualitas;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Pucuk.

B. VISI DAN MISI

Dalam rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2019 serta memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukodadi, maka dianggap perlu untuk ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kecamatan Sukodadi yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Visi :

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa prinsip Otonomi Nyata adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan budaya Daerah. Dan Otonomi Daerah merupakan cara untuk mendekatkan terhadap

pelayanan publik. Jika Pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan bisa menjadi lebih cepat, hemat, murah, sehingga dapat menghasilkan kwalitas layanan masyarakat yang baik.

Untuk mengatasi dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui visinya dituangkan dalam LAKIP Kecamatan Sukodadi adalah ***" Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"***

Dari visi tersebut diharapkan dapat terwujud suatu Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang aspiratif yang dapat di akses secara langsung oleh semua pihak, melalui fungsi - fungsi Pemerintahan yang dapat di pertanggungjawabkan.

2. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap lembaga agar tujuan organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dari gambaran tersebut diatas maka ditetapkan misi Kecamatan Sukodadi adalah:

"MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK" Untuk mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Pucuk telah menyusun Lima Misi sebagai berikut :

✓ **Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah**

Penjelasan :

Personil yang ada di Kecamatan Pucuk sebanyak 28 orang, meskipun jumlah SDM Aparatur Cukup, ternyata Kemampuan dan Profesionalismenya merupakan faktor Penghambat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Pucuk Khususnya pada keterbatasan keahlian, sehingga perlu memberikan Motivasi pada Aparatur untuk meningkatkan Kemampuan baik melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal termasuk mengikuti Diklat dan Pendidikan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

✓ **Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum**

Penjelasan :

Sarana dan Prasarana merupakan kebutuhan yang sangat mendukung dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari dengan sarana dan prasarana yang cukup maka kesulitan yang di hadapi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

✓ **Meningkatkan Pelayanan Masyarakat**

Penjelasan :

Dalam Era Reformasi dan mudahnya memperoleh Informasi di berbagai bidang, maka sangat berpengaruh terhadap adanya tuntutan peningkatan pelayanan yang murah dan cepat serta transparan dari Kecamatan kepada Desa dan masyarakat, dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat maka per1u adanya peningkatan pengetahuan Aparatur Kecamatan dan Desa, sehingga di masa mendatang Kecamatan akan mengantisipasi dan mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

✓ **Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral**

Penjelasan :

Untuk menyampaikan Informasi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan secara cepat pertu adanya Koordinasi melalui rapat Kepala Dinas Instansi Tingkat Kecamatan dan para Seksi serta para Kepala Desa sehingga Program-program yang direncanakan bisa terakses dengan baik.

✓ **Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan**

Penjelasan :

Fungsi Kontrol Pengendalian dan Pengawasan melekat merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Unit maupun Sub Unit pada bawahan, Sehingga tugas dan

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Cara mencapai tujuan dan Sasaran, merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu, mengenai upaya-upaya Kecamatan Pucuk yang meliputi penetapan Program antara lain :

1. Mengembangkan SDM Aparatur Lewat Diklat dan Pembinaan.
2. Menumbuhkan gairah kerja Pegawai untuk membina Lembaga Ekonomi yang ada di Desa.
3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana jalan dan pasar Desa.
4. Peningkatan Kwalitas pelayanan Masyarakat secara transparan dan professional.
5. Pelaksanaan rapat Koordinasi Dinas Instansi di Tingkat Kecamatan dan para Kasi.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Cara mencapai tujuan dan Sasaran, merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu, mengenai upaya-upaya Kecamatan Pucuk yang meliputi penetapan Program antara lain :

1. Mengadakan pembinaan dan Pelatihan Aparatur
   a. Mengadakan pertemuan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Aparat Pernerintah Desa setiap satu Bulan sekali.
   b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Diklat Penjenjangan dan Pembinaan-pembinaan teknis.
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

   Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang Kegiatan perekonomian yang meliputi :
   a. Meningkatkan Sarana Perhubungan
   b. Meningkatkan Pembangunan Pasar desa
   c. Meningkatkan Pembinaan terhadap kemampuan Lembaga Perekonomian yang ada di Desa.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan Desa dan Pasar Desa
   a. Pengerasan dan Pengaspalan Jalan desa
   b. Meningkatkan dan Perluasan Pasar Desa
4. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

   Memberikan pengarahan kepada Aparat Kecamatan dan Desa tentang, pentingnya Pelayanan kepada masyarakat di antaranya :
   a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
   b. Tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan
   c. Tertib dan teliti dalam memberikan pelayanan
5. Meningkatkan Koordinasi Dinas Instansi Tingkat Kecamatan diantaranya :
   a. Melaksanakan rapat Koordinasi setiap satu bulan sekali
   b. Dalam menyelenggarakan setiap kegiatan di Tingkat Kecamatan terlebih dahulu diawali rapat/pertemuan bersama Dinas Instansi Tingkat Kecamatan.

1.1.3 PENERAPAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

KECAMATAN PUCUK TIDAK MENERAPKAN STANDART MINIMAL

(N I H I)

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN CAPAIAN KINERJA MAKRO

(N I H I L)

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN INDIKATOR KUNCI KELUARAN

(N I H I L)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN INDIKATOR KUNCI HASIL

(N I H I L)'

2.2..3 Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel. 2.3

Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Kecamatan Pucuk

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan Keuanagn	20 X 100 % / 20	100%	Kec. Pucuk	-

2	Keuangan	Rp. 3.260.508.800 x 100% Rp. 3.144.946.249	96,46%	Kec. Pucuk	-

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Indek Kupuasan Masyarakat	81,76%
		2. Prosentase capaian layanan public Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100%
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Prosentase Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%
		2. Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANGING DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk Tahun 2020.

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Perkantoran	195.351.600,-	169.506.999,-	86,77%
	Penyediaan Barang Pakai Habis	109.439.400,-	109.349.350,-	99,92%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.550.800,-	79.550.800,-	100%
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	100.000.000,-	100.000.000,-	100%
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional	35.000.000,-	34.931.080,-	99,80%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	51.060.000,-	50.989.200,-	99,86%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	30.000.000,-	5.999.830,-	20%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	40.000.000,-	11.199.830,-	28%
Program Peningkatan Kualitasv Pelayanan Kecamatan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	37.000.000,-	36.983.700,-	99,96%
Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	34.000.000,-	29.163.800,-	85,89%
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	50.000.000,-	49.987.300,-	99,97%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	25.500.000,-	24.441.200,-	95,85%

	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	68.000.000,-	63.172.840,-	92,90%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	34.000.000,-	33.996.900.-	99,99%

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING DENGAN TARGET SEBELUMNYA

Program	Kegiatan	2019	2020
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100%	85,78%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100%	99,97%
Program Peningkatan Keamanan da Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	100%	95,85%
Program Pendidikan Publik Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah fdi Kecamatan	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi	94%	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	-99,62%
	Penyediaan ATK		100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		96%
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undang		100%
	Penyediaan Makan dan Minum		99,91%
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan		99,44%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantior	100%	100%
	Pemelihara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional	98%	99,80%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuang	Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	100%	20%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	28%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pendesaan	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	100%	92,90%
Program Peningkatan Partisipasi	Pemberian Stimulasi Pembangunan	100%	0

Masyarakat Dalam Membanguna Desa	Desa		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	99%	100&%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	92%	0

D. PENGUKURAN KINERJA DIBANDING DENGAN TARGET ALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk antara 2016 dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Ket.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	85,78%	-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100%	100%	100%	100%	99,97%	
Program Peningkatan Keamanan da Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	75%	100%	100%	100%	95,85%	-
Program Pendidikan Publik Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah fdi Kecamatan	80%	100%	0	0	0	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi	80%	100%	142%	94%	0	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%			0	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%			100%	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%			- 99,62%	-
	Penyediaan ATK	100%	100%			100%	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan	100%	100%			100%	-

	Penggandaan						
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%		100%	96%	-
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	100%	100%			100%	-
	Penyediaan Makan dan Minum	100%	98%			99,91%	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan	100%	100%			99,44%	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantior	100%	100%	99%	100%	100%	-
	Pemelihara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	90%	164%	100%	100%	-
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional	100%	89,555	100%	98%	99,80%	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuang	Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	100%	100%	100%	100%	20%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	95%	100%	100%	28%	-
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pendesaan	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	100%	100%	99%	100%	92,90%	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanguna Desa	Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%	0	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	99%	100&%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	100%	92%	0	-

E. ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalan APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah Faktor penentu efisiensi adalah

Faktor Penentu Efesien adalah :

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fiosik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat factor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

F. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUKUNG PERENCANAAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor keberhasilan

- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik msayarakat maupun pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Pucuk;
- Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- ersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkail
- Pembinaan terhadap kelembagaan desa dan kelurahan.
- danya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

b) Faktor kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam programi

c) Langkah-langkah antisipatif

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan alokasi APBD;
- esiapan personil yang akan mengikuti diklat.

1. Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :
2. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah
3. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
4. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
5. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik
6. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

(N I H I L)

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan

a. Urusan Umum

Pelaksanaan Urusan Umum diwujudkan dengan menetapkan 4 (empat) program yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1) Pelayanan Jasa Perkantoran
   2) Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
   1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor
   2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   3) Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor
   4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
   2) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

b Urusan Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Kecamatan diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) program, yaitu :

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
   1) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
   1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
   2) Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3) Pengendalian Keamanan Lingkungan
4) Monitoring dan Evaluasi APBDesa dan PERDES
5) Fasilitasi Penuelenggara Pemerintah Desa

2. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal

a. Urusan Kewilayaan

Pelaksanaan Urusan Kewilayaan yang dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 8(delapan) kegiatan didukung anggaran dana sebesar Rp. 641.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 562.250.189,00 Sedangkan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut

1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Administrasi Perkantoran
Dana : Rp. 304.791.000,00
Realisasi : Rp. 278.856.349,00
Keluaran : - Penyediaan jasa perkantoran
- Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Outcome : - Terpenuhinya belanja jasa perkantoran tepat waktu
- Terpenuhinya belanja barang pakai habis perkantoran dengan baik

2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran : Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas
Dana : Rp. 215.566.000,00
Realisasi : Rp. 215.204.980,00
Keuaran : - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutun/berkala kendaraan dinas/operasional
Outcome : - Terpenuhinya saran prasarana peralatan kantor dengan baik
- Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor yang representive
- Terjaga kondisai yang baik jalan bagi kendaraan dinas;operasional

3) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Ssaran : Aparatur Kecamatan

Dana : Rp. 51.060.000,00

Realisasi : Rp. 50.989.200,00

Keluaran : Pengdaan pakaina dinas beserta perlengkapannya

Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan baik

4) Program : Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran : Pelaksanaan atau penggunaan anggaran

Dana : Rp. 70.000.000,00

Realisasi : Rp. 17.199.660,00

Keluaran : - Penyususnsn pelaporan keuangan sevara berkala
- Penyususnan dokumen perencanaan dan evaluasi

Outcome : - Tercukupnya pelaporan kruangan secara berkala yang Tepat waktu
- Tercukupinya penyususnan

Secara capaian kinerja urusan umum dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

No	Program	Indikator Capaian Program	APBD 2020 (Rp.)	Realiassi (Rp.)	%
1	Pelayaanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa perkantoran	195.351.600	169.506.999	99,44
		2. Braang pakai habis perkantoran	109.439.400	109.349.350	99,92
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	80.566.000	80.273.800	99,64
		2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	100.000.000	100
		3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000	34.391.080	99,80
3	Peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	51.060.000	50.989.200	99,86
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	30.000.000	5.999.830	20
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	40.000.000	11.199.830	28

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indicator capaian program dari masing-masing prpgram pada Urusan Umum menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

1. Pelayaanan Administrasi Perkantoran
   - Pelayaanan Administrasi Perkantoran tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 99,44 % (sangat berhasil)
   - Barang pakai habis perkantoran tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 99,92 % (sangat berhasil)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 99,84 % (sangat berhasil)
   - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 100 %
   - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 99,80 % (sangat berhasil)
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 99,86 % (sangat berhasil)
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarealisai kinerja SKPD tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 20 % (kurang), hal ini dikarenakan tidak melakanakan perjalanan dinas.
   - Penyusunan dokumern perencanaan dan evaluasi tercapai dengan hail capaian kinerja sebesar 28 % (kurang), hal ini dikarenakan tidak melakanakan perjalanan dinas.

b. Urusan Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Kecamatan yang dijabarkan dalam 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan didukung anggaran dana sebesar Rp. 157.547.000 dan terealisasi sebesar Rp. 151.882.000 Sedangkan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut :

1) Program : Peningkatan Kualita Pelayanan Kantor
   Sasaran : Kualitas Pelayanan Kantor
   Dana : Rp. 37.000.000,oo
   Realisasi : Rp. 36.450.000,00
   Keluaran : - Penyediaan Adminitrasi Terpadu

Outcome : - Terlaksananya peningkatan pelayanan public di kecamatan

2) Program : Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembanguanan Kecamatan

Sasaran : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di 17 Desa

Dana : Rp. 120.547.000,00

Realisasi : Rp. 115,432.000,00

Keluaran : - Terelenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk
- Terlaksana Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Pucuk
- Terlaksana Pengendalian Keamanan Lingkungan di Kecamatan Pucuk
- Penyelesaian Penyusunan APBD Desa dan PERDES
- Fasilitasi Penyelenggara Pemerintahan Desa

Outcome : - Meningkatnya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk
- Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Pucuk
- Tecapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pucuk
- Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD Desa dan PERDES
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Desa

Secara capaian kinerja urusan umum dapat dilihat pada table berikut unu :

Tabel 4.2

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan

No	**Program**	**Indikator Capaian Program**	**APBD 2020 (Rp.)**	**Realiassi (Rp.)**	**%**
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor	Penyediaan Adminitrasi Terpadu	37.000.000	3.450.000	98,51
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.000.000	10.000	99,90
		2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	10.000.000	30.000	99,70
		3. Pengendalian Keamanan Lingkungan	25.047.000	10.000,	99,96
		4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	50.000.000	5.065.000	89,87

		5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25.500.000	-	100

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa indicator capaian program dari masing-masing prpgram pada Urusan Umum menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor
   - Pelayaanan Administrasi Terpadu Kecamatan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebear 98,51 % (sangat berhasil)
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
   - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebear 99,90 % (sangat berhasil)
   - Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebear 99,70 % (sangat berhasil)
   - Pengendalian Keamanan Lingkungan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebear 99,96 % (sangat berhasil)
   - Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES tercapai dengan hasil capaian kinerja sebear 89,87 % (sangat berhasil)
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa PERDES tercapai dengan hasil capaian kinerja sebear 100 % (sangat berhasil).

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Kantor Kecamatan Pucuk merupakan penjabaran Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan.

Dari uraian tersebut setiap tahun anggaran Kecamatan Pucuk berkewajiban menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerja tahunan dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sekaligus sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan Pertimbangan Pemeruintah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan [Pemerintah Daerah (LPPD), selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Pucuk April 2021
CAMAT PUCUK

DEDDY DIAN ALI,SE. MM
Pembina Tingakt I
NIP. 19700814 200312 1 006